

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kas merupakan aktiva yang paling lancar dari seluruh aktiva yang ada, kas mempunyai sifat yang mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan pemilikinya, maka uang kas yang keluar akan lebih mudah disalahgunakan. Hal ini terjadi karena hampir seluruh transaksi dalam perusahaan berhubungan dengan kas, baik pada perusahaan jasa, dagang, maupun perusahaan manufaktur. Kas merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kas diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva.

Pengeluaran kas biasanya untuk berbagai tujuan, seperti misalnya untuk membayar beban-beban tertentu, baik sebagai pengeluaran operasional maupun non operasional, untuk membayar utang kepada pemasok, bankir, serta pihak kreditur lainnya, serta bisa juga di keluarkan untuk pembelian aktiva.

Dalam praktik, banyak sekali tindakan kecurangan yang terjadi sebagai akibat dari lemahnya pengendalian internal. Salah satunya kasus penyelewengan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari internet, kasus tersebut berawal dari modus dugaan

penyelewengan penggunaan dana hibah untuk Pilkada dari Pemerintah Kabupaten Karimun ke KPU Karimun, dimulai dari perjalanan dinas fiktif, melakukan kegiatan fiktif dan surat pertanggungjawaban fiktif.¹

Penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah KPU Karimun dengan kerugian negara senilai Rp2.000.000.000. Lima orang adalah komisioner KPU Karimun, yaitu Zulfikri (ketua) dan Darman Munir, Risdiyansyah, Evi Herita dan Adi Hermawan. Dan dua orang pegawai yaitu Tamiah dengan jabatan Bendahara dan Mariani sebagai Kepala Sub Bagian Umum.

Tamiah diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memalsukan tanda tangan, menggunakan kuitansi fiktif dan nota kosong. Sedangkan Mariani mengeluarkan dana dalam kas KPU untuk keperluan fiktif selama masa jabatannya 2010 hingga 2011 lalu.²

Kasus penyelewengan dana hibah KPU ini merupakan bentuk fraud atau kecurangan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti *pressure* (dorongan) seperti dorongan untuk hidup mewah, membayar hutang dan tagihan yang menumpuk, dorongan karena kebutuhan dan masalah keuangan. Dan juga karena adanya *opportunity* (peluang) seperti penyalahgunaan wewenang, dalam kasus ini memanfaatkan jabatannya sebagai Komisaris, Bendahara, dan Sub Bagian

¹ <http://www.delikpos.com/korupsi/item/68-kejari-akan-kupas-kasus-korupsi-kpud-karimun>, di akses 17 Maret 2014, jam 23.30.

² <http://www.tanjungpinangpos.co.id/2014/02/90033/palsukan-tanda-tangan-hingga-kuitansi-fiktif.html>, di akses 17 Maret 2014, jam 23.35.

Umum untuk melakukan pengeluaran serta pembuatan dokumen fiktif. Motif lainnya juga bisa karena rasionalisasi, yang menganggap bahwa perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Kasus di atas contoh kecurangan yang terjadi pada birokrasi, contoh lainnya yaitu kecurangan yang terjadi di perusahaan seperti yang dilakukan oleh Erwinsyah Dwi Nugraha yang menjabat sebagai Asisten Keuangan pada PT Mega Ika Khanza, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur keuangan PT Mega Ika Khanza. Erwinsyah melakukan tindak kecurangan membuat laporan pengeluaran keuangan secara fiktif dengan membuat laporan pengeluaran secara double, serta membuat laporan pengeluaran uang sudah dibayarkan, kenyataanya terdakwa Erwinsyah tidak membayarkannya kepada yang berhak menerimanya³

Erwinsyah pada tanggal 29 Juni 2012 membuat catatan melakukan pembayaran biaya pengobatan karyawan PT Mega Ika Khasna ke POSTU Baung periode Januari 2012 sebesar Rp 12.340.000, pengeluaran tersebut ternyata di catat kembali pada tanggal 23 Juli 2012, seolah-olah pada tanggal tersebut terjadi pengeluaran keuangan untuk membayar biaya pengobatan karyawan PT Mega Ika Khasna ke POSTU Baung. Erwinsyah juga melakukan pencatatan pembayaran bantuan keramba ikan Desa Tanjung Rangas sebesar Rp 13.210.000 ke TK

³ <http://cts.pn-sampit.go.id/perkara>, di Akses 21 April 2014, Jam 08.00.

Telaga Baru, ternyata terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut ke TK Telaga Baru.

Kasus tersebut merupakan bentuk kecurangan yang terjadi karena adanya peluang, memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kedua contoh kasus tersebut menggambarkan lemahnya pengendalian internal, agar penyelewengan terhadap kas tidak terjadi, maka diperlukan suatu pengendalian intern yang baik. Pengendalian internal meliputi semua perencanaan dari suatu organisasi dan metode serta prosedur yang diterapkan manajemen dalam rangka menjaga aset perusahaan dari pencurian, manipulasi, dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, serta penggunaan harta kekayaan perusahaan yang tidak diotorisasi.

Pengendalian internal dilakukan dalam rangka meningkatkan akurasi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi risiko kesalahan dalam proses akuntansi yang dilakukan. Pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dapat dilakukan dengan adanya pemisahan fungsi serta tanggung jawab yang jelas antara fungsi pengesahan pengeluaran, fungsi yang melakukan pengeluaran atau pembayaran serta fungsi yang melakukan pencatatan pengeluaran. Pengendalian internal atas pengeluaran kas akan lebih efektif jika dilakukan dengan cek atau transfer lewat rekening bank, dari pada dengan melibatkan uang kas secara langsung. Pengecualian dibuat untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil, dimana pengeluaran ini mungkin dapat dibiaya lewat dana kas kecil.

Pengendalian internal atas pembayaran kas seharusnya memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi-transaksi yang benar-benar telah diotorisasi dengan semestinya. Untuk menjamin pengendalian internal yang baik maka pemisahan tugas sangat mutlak diperlukan. Sudah dapat dipastikan apa yang terjadi jika bagian pembelian juga merangkap dengan bagian pembayaran dan pembukuan. Dalam hal ini, tindakan kecurangan yang dilakukan sangat mungkin terjadi.

Dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka akan dapat memperlancar kegiatan perusahaan, serta dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pengendalian yang baik dan efektif, memungkinkan pimpinan perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan serta dapat mengatur dan merencanakan pekerjaan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. PT Hilman Primakarya Indonesia merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya menjual barang, tentunya tingkat perputaran uangnya tinggi. Karenanya perlu pengendalian internal yang baik terhadap kas. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengendalian internal atas pengeluaran kas yang diterapkan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun Karya Ilmiah dengan judul **“Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada PT Hilman Primakarya Indonesia)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

Bagaimanakah pengendalian internal pengeluaran kas yang diterapkan PT Hillman Primakarya Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal dalam pengeluaran kas yang telah dijalankan dalam perusahaan.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Memberi tambahan pengetahuan mengenai manfaat pengendalian internal khususnya pengendalian internal terhadap pengeluaran kas.

b. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan lebih lanjut dalam mengambil keputusan yang akan dilakukan selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Manfaat Penulisan Karya Ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah sejenis.